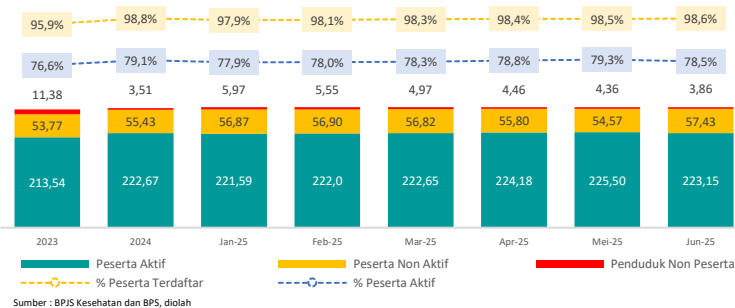


Monthly Report Monitoring JKN

30 Juni 2025

Kepesertaan dan Kesehatan Keuangan

Peserta Aktif dan Non Aktif dalam Juta Jiwa

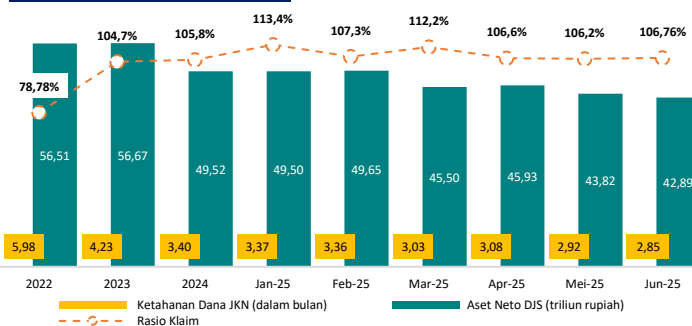


No	Segmen Peserta	Juni 2025			
		Aktif	Non Aktif Menunggak	Non Aktif Mutasi	Total Peserta Teraftar
1	Penerima Bantuan Iuran	96.294.268	-	21.969.409	118.263.677
2	PPU Penyelenggara Negara	18.956.366	30.066	893.527	19.879.959
3	PPU Non Penyelenggara Negara	37.910.971	164.938	8.577.019	46.652.928
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU)	17.217.944	14.394.681	1.764.398	33.377.023
5	Bukan Pekerja (BP)	4.913.836	32.849	421.821	5.368.506
	a. BP Penyelenggara Negara (BP PN)	4.473.757		373.539	4.847.296
	b. BP Swasta (BP Non PN)	440.079	32.849	48.282	521.210
6	PBPUPU Pemda	47.860.457		9.180.713	57.041.170
Total Peserta		223.153.842	14.622.534	42.806.887	280.583.263

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Kepesertaan non aktif sebesar 57,4 juta jiwa atau 20,47% dari total peserta, bertambah 2 juta jiwa dibanding 31 Desember 2024. Peserta non aktif dikarenakan menunggak sejumlah 14,62 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPUPU Mandiri sebesar 14,39 juta (98,44%). Peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 42,8 juta, yang terdiri dari 21,97 juta dari segmen PBI, dan sebesar 9,18 juta dari segmen PBPUPU Pemda. Sebesar 8,57 juta dari PPU Non PN disebabkan oleh perubahan status pekerjaan dan belum menentukan segmen kepesertaan JKN, 893,53 ribu peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, dan diikuti segmen yang lainnya.

Kondisi Kesehatan Keuangan



Aset Neto DJS Kesehatan diproyeksikan dapat membiayai 2,85 bulan kedepan (**sehat, namun rentan defisit**). Tren rasio klaim >100% perlu diiringi dengan kinerja BPJS Kesehatan dalam kendali mutu dan biaya jaminan, meningkatkan kolektabilitas iuran dan pendapatan lainnya, termasuk pendapatan investasi. **YoI DJS Kesehatan** sebesar 3,42% atau Rp2,3 triliun, dengan rata-rata kelolaan dana investasi sebesar Rp67,9 triliun, terbagi pada surat utang negara sebesar Rp34,01triliun (50%), deposito sebesar Rp3,2 triliun (46%), dan SRBI sebesar Rp2,66 triliun (4%), target **YoI** sebagaimana ICK 2025 sebesar 7%.

Dana operasional BPJS Kesehatan tahun 2025 ditetapkan 3,55% dari penerimaan iuran program JKN, dan atau maksimal Rp5,98 triliun sebagaimana PMK 134/2024. Realisasi **Beban terhadap dana operasional + pendapatan investasi (BOPO)** berada diposisi **103,78%**, belum memenuhi ketentuan Permenkeu 251 Tahun 2016 yang mengamahkan maksimal BOPO sebesar 95%. **YoI BPJS Kesehatan** sebesar 1,95% (neto), dengan perolehan imbal hasil investasi sebesar Rp223,29 miliar dari rata-rata portofolio Investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp11,43 triliun. Imbal hasil investasi BPJS Kesehatan ditargetkan dalam ICK Tahun 2025 sebesar 7%.

Cakupan kepesertaan JKN Per 30 Juni 2025 telah mencapai 280,6 juta jiwa atau 98,6% dari total penduduk Indonesia Tahun 2025. Cakupan peserta tumbuh 2,48 juta (0,89%) dibanding 31 Desember 2024 (YDT). Berdasarkan capaian cakupan peserta yang hampir menyeluruh, maka fokus dan strategi saat ini lebih menekankan pada meningkatkan keaktifan peserta JKN disemua segmen.

Capaian **kepesertaan aktif** sebesar 223,15 juta jiwa atau 78,5% dari jumlah penduduk, dan 79,53% dari keseluruhan peserta, peserta aktif tumbuh 0,22% atau 486,2 ribu jiwa dibanding 31 Desember 2024, penambahan/penurunan peserta aktif didorong oleh beberapa segmen berikut :

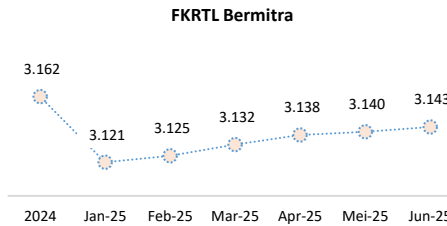
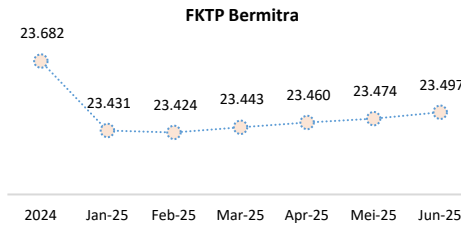
- **PBI JK** 390,28 ribu jiwa (-0,40%)
- **PPUPN** +15,54 ribu jiwa (+0,08%)
- **PPUBU** +465,13 ribu jiwa (+1,24%)
- **PBPUPU** +5,05 ribu jiwa (+0,03%)
- **BP** -43,27 ribu jiwa (-0,87%)
- **PBPUPU Pemda** +434,09 juta jiwa (+0,92%)

Per 30 Juni 2025, program JKN mencatatkan defisit operasional yang menyebabkan **penurunan aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp6,6 triliun (YTD)**. Hal ini terjadi karena realisasi beban jaminan kesehatan sebesar Rp91,2 triliun telah melampaui pendapatan iuran yang terkumpul sebesar Rp85,4 triliun, sehingga menghasilkan **rasio klaim sebesar 106,76%**. Perolehan pendapatan iuran telah mencapai 49,98% dari target tahun 2025. Tren penurunan aset neto dan rasio klaim yang berada di atas 100% ini telah berlangsung konsisten sejak tahun 2023, hal tersebut menunjukkan pendapatan belum mampu mengimbangi tingginya biaya layanan kesehatan JKN.

Monthly Report Monitoring JKN

30 Juni 2025

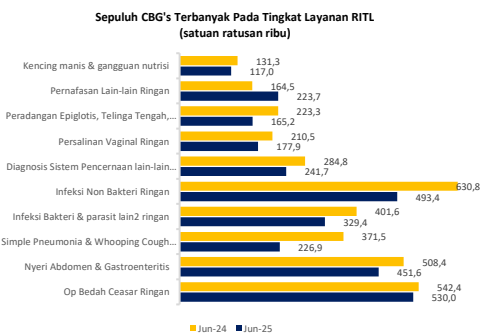
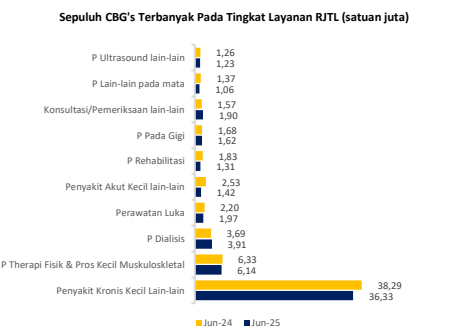
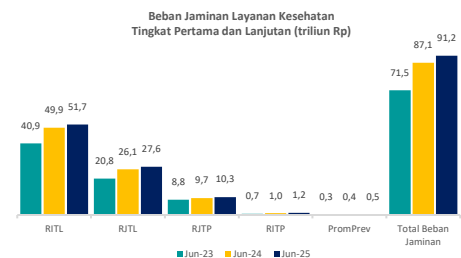
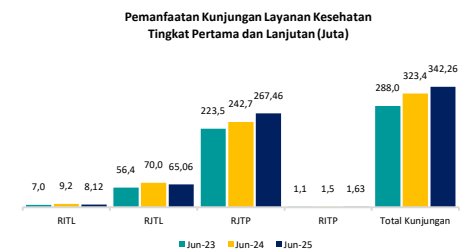
Kerjasama Faskes dan Utilisasi



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

tertinggi sebanyak 33. **Kerja sama FKRTL tercatat 3.143**, turun 19 dibanding akhir 2024. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 4.577 apotek dan 1.242 optik sebagai fasilitas kesehatan Penunjang. Capaian kerja sama FKTP tersebut belum memenuhi target ICK 2025 yang ditetapkan DJSN sebesar 23.664 FKTP, sedangkan FKRTL telah memenuhi ICK yang ditargetkan sebesar 3.133 FKRTL.

Per Juni 2025, **kerja sama dengan FKTP** tercatat sebanyak 23.497, turun 185 FKTP dibanding 31 Desember 2024 (YTD). Penurunan terbesar berasal dari Dokter Praktik Perorangan (DPP) yang berkurang 186 menjadi 4.463. Sementara itu, klinik pratama mengalami peningkatan



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Pemanfaatan layanan kesehatan hingga 30 Juni 2025 meningkat sebanyak 5,8% dibanding periode Juni 2024 (YoY). Pemanfaatan tertinggi berasal dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebanyak 342,26 juta kunjungan, mengalami peningkatan 10,2% atau 24,7 juta dibanding Juni 2024. Selanjutnya diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 65,06 juta kunjungan, menurun -7,1%. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebanyak 8,12 juta kunjungan, menurun -11,9% dan pemanfaatan layanan kesehatan terendah terdapat di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) sebanyak 1,63 juta, meningkat 11,8%. Berdasarkan hal tersebut, fungsi *gatekeeper* FKTP semakin optimal dalam menyerap tingginya kebutuhan layanan primer peserta JKN. Efisiensi ini dipertegas dengan keberhasilan menekan beban di layanan yang lebih mahal selama 6 bulan terakhir, yaitu penurunan kunjungan RJTL dan RITL, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan efektifitas biaya Program JKN.

Beban Jaminan pada Juni 2025 mengalami peningkatan 4,7% dibanding Juni 2024 (YoY), dari Rp87,1 triliun menjadi Rp91,2 triliun. Alokasi beban jaminan didominasi pada Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar Rp51,7 triliun atau 56,7% dari keseluruhan beban jaminan, diikuti oleh Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) sebesar 30,2%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11,3%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1,3% dan terkecil adalah alokasi promotif dan preventif sebesar 0,5% dari keseluruhan beban jaminan.

Pembayaran manfaat RJTL per Juni 2025 mencapai Rp27,6 triliun, naik 5,4% dibanding pembayaran manfaat RJTL hingga Juni 2024 (YoY). Jumlah kunjungan RJTL adalah sebesar 65,06 juta kunjungan, dengan diagnosa terbanyak di RJTL yaitu penyakit kronis kecil lain-lain, prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal, prosedur dialisis, perawatan luka, penyakit akut kecil-kecil lain, dan lain sebagainya. Penurunan mayoritas kasus terbesar CBG's RJTL adalah bukti keberhasilan pengendalian di layanan lanjutan.

Pembayaran manfaat RITL hingga Juni 2025 mencapai Rp51,7 triliun, meningkat 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (YoY). Kasus terbanyak didominasi oleh infeksi non bakteri (ringan), disusul oleh persalinan dengan operasi bedah caesar ringan, serta nyeri abdomen & gastroenteritis. Hampir semua kelompok INA-CBG's RITL sampai Juni 2025 menunjukkan penurunan volume layanan dibandingkan periode yang sama pada 2024, kecuali pernafasan lain-lain ringan. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan pola rujukan dan/atau pergeseran layanan dengan kendali mutu dan kendali biaya yang lebih optimal. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kebijakan kendali mutu dan biaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta, sehingga tidak menimbulkan hambatan akses layanan kesehatan yang seharusnya dapat diberikan di tingkat lanjutan.